

KAJIAN KRITIS TERHADAP STANDARISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Suparmin

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Veteran Bangun Nusantara
email: suparmin@univetbantara.ac.id

Abstrak

Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia mengasumsikan bahwa pengembangan standarisasi, jaminan kualitas dan akreditasi harus di pahami sebagai respon negara terhadap situasi semakin kompleks yang disebabkan oleh banyaknya institusi pendidikan tinggi swasta. Akreditasi di gunakan untuk mengendalikan sistem pendidikan tinggi dan untuk menjaga standar kualitas minimal. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Visi pemerintah Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan daya saing globalnya dan memperoleh posisi terhormat di antara negara-negara lain. Akan tetapi visi tersebut belum tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil Laporan Ekonomi Dunia, kontribusi pendidikan tinggi terhadap daya saing Indonesia hanya mencapai 4,5 (dari 7) dalam aspek *pendidikan tinggi dan pelatihan* pada 2017-2018 (Moeliodihardjo, Soemardi, & Kurnia, 2017). Pendidikan tinggi tidak dapat berkontribusi secara berarti dalam meningkatkan daya saing Indonesia tanpa peningkatan kualitas yang signifikan.

Kata kunci: *standarisasi, jaminan kualitas, akreditasi.*

CRITICAL STUDY ON EDUCATIONAL STANDARDIZATION IN INDONESIA

Suparmin

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Veteran Bangun Nusantara
email: suparmin@univetbantara.ac.id

Abstract

Some countries in the world, including Indonesia, assume that the development of standardization, quality assurance and accreditation must be understood as a state response to the increasingly complex situation caused by the many private higher education institutions. Accreditation is used to control the system of higher education and to maintain minimum quality standards. Based on these reasons, the current vision of the Indonesian government is to improve its global competitiveness and gain a respectable position among other countries. However, the vision has not been reached optimally. Based on the results of the World Economic Report, the contribution of higher education to Indonesia's competitiveness is only 4.5 (out of 7) in the aspect of higher education and training in 2017-2018. Higher education can not contribute significantly to improving Indonesia's competitiveness without significant quality improvement.

Keywords: *standardization, quality assurance, accreditation*

PENDAHULUAN

Sebagian besar negara termasuk Indonesia telah merumuskan dan menetapkan standar nasional pendidikan dan sistem serta prosedur jaminan mutu di pendidikan tinggi serta berusaha menyandingkan, menyetarakan sistem pendidikan dengan dunia industri atau dunia kerja. Iklim pendidikanpun mulai berubah, regulasi akademik konvensional dan informal yang telah berlangsung selama berabad-abad telah digantikan oleh sistem yang eksplisit, formal dengan mekanisme jaminan kualitas dan prosedur pelaporan eksternal yang akuntabel.

Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, mengasumsikan bahwa pengembangan standarisasi, jaminan kualitas dan akreditasi harus di pahami sebagai respon negara terhadap situasi semakin kompleks yang disebabkan oleh banyaknya institusi pendidikan tinggi swasta. Akreditasi di gunakan untuk mengendalikan sistem pendidikan tinggi dan untuk menjaga standar kualitas minimal. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Visi pemerintah Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan daya saing globalnya dan memperoleh posisi terhormat di antara negara-negara lain. Akan tetapi visi tersebut belum tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil Laporan Ekonomi Dunia, kontribusi pendidikan tinggi terhadap daya saing

Indonesia hanya mencapai 4,5 (dari 7) dalam aspek *pendidikan tinggi dan pelatihan* pada 2017-2018 (Moeliodihardjo, Soemardi, & Kurnia, 2017). Pendidikan tinggi tidak dapat berkontribusi secara berarti dalam meningkatkan daya saing Indonesia tanpa peningkatan kualitas yang signifikan, dan jaminan kualitas merupakan bagian integral dari itu.

KAJIAN TEORITIS

Pendidikan Nasional di Indonesia

Di masyarakat Indonesia dewasa ini muncul banyak kritik baik dari praktisi pendidikan maupun dari kalangan pengamat pendidikan mengenai pendidikan nasional yang tidak memiliki arah yang jelas. Ketidakjelasan arah pendidikan menunjukkan hilangnya peran vital pendidikan nasional. Saat ini yang tampak adalah pendidikan nasional bukan lagi pemersatu bangsa tetapi telah menjadi ajang pertikaian dan persemaian manusia-manusia yang berdiri sendiri dalam arti yang sempit, mementingkan diri dan kelompoknya. Menurut Tilaar (2012) terdapat dua kekuatan besar yang mempengaruhi jalannya pendidikan nasional dewasa ini.

Pertama, kekuatan politik. Pendidikan nasional telah menjadi sub organisasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis maksudnya pendidikan telah dimasukan di dalam kancah perebutan kekuasaan oleh

partai-partai politik. Bukan lagi bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, tetapi membangun kekuatan politik praktis tertentu untuk kepentingan golongan maupun kelompoknya. Manusia dipandang sebagai objek dan bukan subjek yang harus menjadi pusat perhatian. Yang dipentingkan saat ini adalah pembangunan sarana-sarana fisik dan prasarana politik sehingga mengaburkan kebutuhan-kebutuhan yang paling esensial dari manusia Indonesia.

Kedua, kekuatan ekonomi. Masyarakat Indonesia tidak terlepas dari gelombang modernisasi yang melanda seluruh dunia. Kemajuan teknologi telah menguasai segalanya. Saat ini kekuatan ekonomi telah memasuki kehidupan pendidikan nasional. Salah satu bentuk pemikiran ekonomis ialah berorientasi liberalisme atau neo liberalisme. Orientasi neo liberalisme memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positifnya ialah memberikan orientasi praktis terhadap pendidikan nasional agar menunjang perbaikan hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia. Sedangkan nilai negatifnya adalah mempersempit tujuan pendidikan sebagai upaya memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sesuai paradigma ekonomi modern sistem pendidikan nasional disusun berdasarkan pertimbangan efisiensi, produktif dan berdaya saing. Prinsip tersebut dapat membawa pendidikan

kepada pertimbangan semata-mata mencari profit atau keuntungan terhadap investasi yang telah diberikan. Demi mencapai efisiensi dan kualitas pendidikan maka disusulah berbagai upaya standarisasi. Munculah konsep-konsep seperti ujian nasional yang bukan lagi merupakan suatu upaya untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan tetapi dijadikan suatu tolok ukur menentukan nasib anak (Levenson, 2003). Lihat saja materi yang menjadi Ujian Nasional, yaitu Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Sejarah dan Geografi tidak dilihat sebagai materi yang perlu dikuasai dan disadari oleh setiap insan Indonesia. Lalu, dimanakah fungsi Ujian Nasional untuk membina kohesi nasional? Negara-negara besar lain menjadikan Geografi dan Sejarah sebagai tuntutan dalam pendidikan nasionalnya (Cizek, 1999).

Ujian nasional yang homogen untuk seluruh Indonesia, tanpa menghormati kebebasan guru di muka kelas dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan telah mengatur tanpa memberi peluang tumbuhnya kreativitas dan demokrasi (Postman dalam Tilaar, 2012).

Trend Kualitas Pendidikan Indonesia

Gambaran mengenai ranking pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi pada tataran internasional menunjukkan rendahnya mutu pendidikan

Indonesia. Pemerintah kemudian berupaya menaikkan mutu pendidikan nasional antara lain dengan mengadakan Ujian Nasional. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah Ujian Nasional bisa meningkatkan mutu pendidikan kita?

Profil pendidikan di Indonesia ternyata sangat kompleks, berbeda dengan negara lain yang setara. Kompleks karena adanya perbedaan yang mencolok antar daerah, khususnya antara pulau jawa dengan yang lain, juga perbedaan antara kota dan desa. Berbicara mengenai standar nasional pendidikan adalah hal yang niscaya (Tilaar, 2012). Kita perlu memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana sebenarnya standar pendidikan di masing-masing daerah.

Di dalam teori perencanaan pendidikan, ada 3 komponen besar penentu standar pendidikan, yaitu: 1) *Curriculum*. Kurikulum disusun berdasarkan berbagai sudut pandang seperti kurikulum berorientasi pada mata pelajaran (subject matter) kurikulum berorientasi pada kebutuhan siswa (child centered), dan kurikulum berorientasi pada kebutuhan kehidupan nyata. 2) *Performance*. Performance merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Performance di dalam prose pendidikan merupakan suatu kumpulan dari berbagai faktor yang sangat kompleks. Tentunya performance siswa tidak hanya ditentukan dari dalam sekolah saja, tetapi juga dari luar sekolah. Seperti tingkat

sosial-ekonomi siswa, budaya dan politik di suatu daerah. 3) *Opportunity to Learn*. Siswa akan memiliki kesempatan belajar jika guru dan sekolah menyediakan fasilitas. Termasuk fasilitas fisik dan non fisik. Gedung, ruang kelas, ruang lab, kelengkapan media dan sumber belajar, suasana kondusif dan menyenangkan juga termasuk di dalamnya.

Perlunya Standarisasi Pendidikan

Melalui manajemen ilmiah (scientific management) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Taylor (Tilaar, 2012) dunia dapat diatur dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kehidupan masa depan dapat diprediksi apalagi dengan adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Jalannya perubahan di dunia ini dapat diatur apabila kita membuat standar-standar tertentu yang dijadikan sebagai patokan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Standarisasi, penguasaan berbagai jenis kompetensi untuk mencapai kualitas dari hasil produksi industri pendidikan merupakan buah pemikiran yang organistik dari pengembangan ilmu pengetahuan di era modernisasi.

Standarisasi, kompetensi, sertifikasi, semua ini berdasarkan kepada praduga adanya dunia yang statis yang dapat dikuasai oleh ilmu dan teknologi. Menurut Postman dalam Tilaar (2012) telah lahir

suatu masyarakat yang disebutnya “teknopoli”, yaitu masyarakat yang dikuasai oleh paradigma-paradigma teknologi. Masyarakat ini kehilangan daya kreativitas karena semua diserahkan kepada penguasaan teknologi yang dapat mengatur kehidupan manusia. Lihat saja, komputer yang seharusnya sebagai alat untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah secara cepat dan tepat kini telah menguasai cara berpikir manusia yang ingin serba cepat, instan, dan dapat diukur. Namun, sebenarnya prediksi-prediksi yang optimis dari kemajuan ilmu pengetahuan rasio manusia hanya menghasilkan suatu dunia yang tidak menentu, atau penuh resiko. Satu contoh musibah yang terjadi dalam kasus Chernobyl tahun 1986, penguasaan teknologi nuklir ternyata tidak sepenuhnya dapat dikuasai oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu penggunaan teknologi nuklir masih menjadi perdebatan. Pada satu pihak manusia ingin mencari bahan-bahan pengganti minyak bumi, di lain pihak pengembangan tenaga nuklir yang tidak terkendali justru dapat dijadikan sebagai alat politik kekuasaan dari negara-negara super-power kepada negara-negara kecil lainnya. Disinilah pendidikan humanistik dibutuhkan untuk membangunkan suara hati manusia agar menyadari hakikatnya, baik sebagai individu, spesies, atau sebagai masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Setiap proses yang bertujuan tentu memiliki ukuran, untuk mengukur sudah sejauh mana perjalanan kita dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan pendidikan adalah sesuatu yang *intangibile* dan terus berubah dan meningkat (Tilaar, 2012). Artinya bukan tujuan fisik seperti jarak suatu tempat atau target produksi. Tujuan pendidikan harus selalu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, diperlukan standar yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Hal ini berarti perlu perumusan yang jelas dan terarah serta *feasible*. Di dalam UUD 1945 telah dirumuskan suatu tujuan yang ideal, yakni mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Sistem pendidikan nasional merupakan satu upaya untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana tercapainya manusia Indonesia yang cerdas maka kita dapat melihat kenyataan sehari-hari di dalam masyarakat Indonesia. Melihat kenyataan itu, perlu kiranya ada sebuah standar. Bukan standar dalam arti kaku, tetapi standar yang terus menerus meningkat, dan harus selalu disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Akreditasi sebagai Jaminan Mutu

Pendidikan

Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah tetapi sekolah dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Akreditasi merupakan alat regulasi diri (self-regulation) agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya.

Secara umum pedoman penilaian akreditasi itu meliputi 1) aspek akademik, meliputi kurikulum, guru, siswa, perpustakaan, dan penyelenggara serta 2) aspek kelembagan, meliputi organisasi, sarana prasarana, keuangan, dan tenaga pendidikan. Melalui akreditasi akan terukur tingkat akuntabilitas institusi. Akuntabilitas mutu pelayanan adalah bentuk pertanggungjawaban institusi kepada *stakeholders*, yaitu melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu dengan memilih

dan menetapkan aspek atau dimensi mutu, salah satunya adalah aspek atau dimensi mutu pelayanan akademik kepada siswa/mahasiswa (DAMME, n.d.). Akuntabilitas juga diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan kepada orang lain, menjelaskan, membenarkan, menjawab pertanyaan tentang bagaimana sumber daya telah digunakan dan untuk apa efeknya (Soerjaningsih, 2004).

Dampak pemberlakuan akreditasi sekolah telah menunjukkan beberapa perubahan. Adapun dampak yang timbul dapat berupa dampak yang bersifat positif dan dampak yang berakibat negatif. Berikut adalah dampak positif dari pemberlakuan sistem akreditasi. 1) Tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing baik sebagai kepala sekolah, guru, staf TU, siswa dan komite sekolah. 2) Tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi. 3) Tumbuhnya kesadaran bekerjasama seluruh komponen sekolah untuk mendapatkan penilaian yang terbaik terkait hasil dari akreditasi. 4) Mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh sekolah sebagai bahan perbaikan dan pembinaan sekolah ke depan. 5) Tumbuhnya kesadaran meningkatkan mutu pendidikan melalui pencapaian standar yang telah ditetapkan.

6) Tumbuhnya kebanggaan dari segenap warga sekolah dan mempertahankan hasil akreditasi apabila telah memperoleh yang terbaik misalnya terakreditasi A.

Sementara dampak negatif yang timbul akibat penerapan sistem akreditasi adalah:

- 1) Peningkatan kinerja dari komponen sekolah hanya sebatas ketika akan dilakukan akreditasi sementara setelah selesai akan kembali seperti kondisi semula.
- 2) Adanya berbagai macam rekayasa data hanya sekedar untuk memenuhi penilaian sementara pada proses yang sebenarnya tidak dilakukan seperti dalam pembuatan bukti-bukti fisik.
- 3) Status akreditasi kurang membawa pengaruh bagi pembinaan sekolah karena hanya sekedar memberi status dan label.

Melalui penggunaan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah. Proses akreditasi berfungsi untuk:

- 1) pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator.
- 2) Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- 3) Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah, pemerintah, dan

masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Ada dua kekuatan besar yang mempengaruhi jalannya pendidikan nasional saat ini, yakni kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Standarisasi, penguasaan berbagai jenis kompetensi untuk mencapai kualitas dari hasil produksi industri pendidikan merupakan buah pemikiran yang organik dari pengembangan ilmu pengetahuan di era modernisasi. Ada 3 komponen besar penentu standar pendidikan, yaitu: kurikulum (standar isi), performance (standar proses), dan opportunity to learn (kesempatan belajar). Saat ini diperlukan standar yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan perumusan yang jelas dan terarah serta feasible. Penerapan sistem akreditasi telah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Namun, melalui penggunaan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan khususnya standar nasional pendidikan sangat diperlukan bagi pelaksana pendidikan, sebagai dasar mengelola institusinya. Pemerintah juga

perlu menjadikan output dan outcome sebagai perhatian utama dari penilaian akreditasi institusi pendidikan.

REFERENSI

Cizek, J. 1999. Handbook of Educational Policy
DAMME, D. V. (n.d.). VIII. Standards and Indicators in Institutional and Programme

Accreditation in Higher Education: A Conceptual Framework and a Proposal, 33.
Levenson, M.R. 2003. *Why Current Assessment Don't Measure Up*. Harvard Education Letter.
Soerjaningsih, T. W. (2004). Peningkatan Mutu Proses Perguruan Tinggi Melalui Sistem Mutu Iso 9000. *The Winners*, 5(2), 79. <https://doi.org/10.21512/tw.v5i2.3853>
Tilaar, H.A.R. 2012. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu tindakan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.